



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website :
www.komnasham.go.id

SIARAN PERS

No.: 004/ HUMAS- KH/ II / 2016

Sebagai tindak lanjut dari pengaduan perwakilan warga Kalijodo kepada Komnas HAM pada 15 Februari lalu yang merisaukan rencana Gubernur DKI Jakarta yang akan segera menggusur pemukiman mereka yang telah dihuninya puluhan tahun, disampaikan beberapa pertimbangan berikut:

Pertama, sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta yang akan menggusur kawasan Kalijodo pada 29 Februari 2016, kiranya dapat ditunda hingga pada batas waktu yang lebih tepat. Saat ini, anak-anak keluarga warga Kalijodo yang jumlahnya ribuan orang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi uji coba Ujian Nasional yang akan berlangsung pada 29 Februari – 3 Maret 2016. Selanjutnya, bagi mereka yang duduk di kelas 7 dan 8 akan mengikuti Ulangan Umum Semester Genap (7- 10 Maret), dan Ujian Praktek (21-31 Maret), yang kemudian disusul dengan ujian akhir sekolah (4-8 April), uji coba Ujian Nasional (18-21 April), Ujian Nasional (8-12 Mei), dan terakhir, Ulangan Kenaikan Kelas (6-10 Juni).

Sekiranya tidak ada lagi pilihan lain, penggusuran kawasan Kalijodo tetap harus dilakukan, kiranya penggusuran dilaksanakan setelah anak-anak mereka menjalani seluruh rangkaian Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, tersebut.

Seorang Pemenang Nobel Sastra Gabriela Mistral (1945), di salah satu puisinya menuliskan: "*We are guilty of many errors and many faults, But our worst crime is abandoning the children, Neglecting the fountain of life.*" (Banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kebiadaban (*the worse crime*) dari segala kebiadaban adalah pengabaian atas kepentingan anak-anak kita, melalaikan mata air kehidupan kita). Bahkan di Konvensi Hak Anak yang telah kita ratifikasi pada 5 September

1990, salah satu perinsipnya adalah memilih yang terbaik bagi anak. Jika kita melakukan penggusuran di Kalijodo pada saat-saat anak tengah belajar untuk menghadapi ujian, berikhtiar untuk kebesaran masa depannya, kita akan mempertontonkan kerendahan martabat dan penghormatan kita atas nilai-nilai kemanusiaan yang kita anut.

Kedua, pada 8 Desember 2015 lalu. Harian Kompas mengangkat laporan Bank Dunia yang memperlihatkan hanya 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan bangsa ini, atau 49,7 persen sisa kekayaan negeri ini diperebutkan oleh 99 persen seluruh jumlah penduduk, 256 juta jiwa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, 74 persen tanah di seluruh pelosok tanah air dikuasai penggunaannya oleh hanya 0,2 persen penduduk. Bahkan ada satu perusahaan menguasai 5 juta Ha tanah. Jika ini tidak segera diatasi, maka akan menjadi bom waktu bagi hari depan kita bersama.

Karenanya, negara terutama Pemerintah Pusat dan Daerah harus hadir untuk memberi hak bagi kaum miskin perkotaan untuk memiliki lahan. Mereka yang mendiami Kalijodo yang sudah puluhan tahun dengan status kepemilikan tanah yang sah dengan pemilikan sertifikat berstatus hak milik, membayar pajak, kiranya tidak digusur dan memindahkannya ke Rusunawa begitu saja, melainkan harus memberi kompensasi sesuai nilai pasar atas kehilangan kepemilikan tanahnya.

Pemda DKI harus secara sungguh memberlakukan kebijakan 1:2:3 yang mewajibkan semua pengembang pembangunan perumahan. Termasuk rumah susun (apartemen) dengan formula setiap satu rumah mewah bagi keluarga mampu terdapat dua bangunan rumah untuk kelas menengah dan tiga rumah bagi keluarga tidak mampu.

Ketiga, keberhasilan Walikota Surabaya berdialog dengan warganya ketika menertibkan kawasan prostitusi Dolly beberapa waktu lalu, dan keberhasilan Gubernur DKI Joko Widodo (2013) menertibkan Pasar Tanah Abang yang puluhan tahun dikuasai premanisme, pemalakan liar bagi pedagang kaki lima, dan kesemrawutan. Rahasia dari kesuksesan mereka adalah kesediaan Walikota dan Gubernurnya untuk berdialog dengan warganya.

Karenanya, dengan pengalaman yang baik itu seharusnya dilakukan pula dialog serupa antara Gubernur dengan warganya di Kalijodo. Pemda tidak boleh berjarak dengan warga yang memilihnya yang mengantarnya terpilih sebagai pemimpinnya.

Terakhir, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mandiri yang sejajar dengan lembaga negara lain mendapat mandat dari sejumlah undang-undang dalam memajukan dan melindungi HAM bagi semua warga negara. Dengan mandat ini, Komnas HAM bersedia memidiasi proses pengurusan Kalijodo agar tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan kita semua.

Jakarta, 22 Februari 2016



Hafid Abbas

Komisioner Komnas HAM RI